

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004
TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Beka\$ Pre\$iden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan \$ebagaimana dlmaksud dalam hurufa dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan, Wakil Presiden Repubtik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dari Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tphun 2003 Nomor 47,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dan Pasal 1 setinggi-tingginya Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah),
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhenti dari jabatannya.
- (3) Segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Negara.
- (4) Nilai pengadaan rumah sebesar (Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
- (3) Apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah."

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai "Pasal 5 berikut:

- (1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan wakil Presiden ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
 - a. nama Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden;
 - b. letak rumah;
 - c. luas dan harga dari tanah dan bangunan."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 September 2004.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO